

**GREEN ECONOMY DEVELOPMENT: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES
IN INDONESIA**

**PENGEMBANGAN EKONOMI HIJAU: PELUANG DAN TANTANGAN DI
INDONESIA**

Rahyono

Universitas Malahayati, Indonesia
rahyono021@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to identify opportunities, challenges, and strategies in developing a green economy in Bandar Lampung, as well as provide relevant recommendations to encourage the implementation of sustainable development at the local level. The results of the study indicate that Bandar Lampung has various significant opportunities, such as abundant natural resource potential, active involvement of local communities, supportive government policies, and private sector investment interest, especially in the renewable energy and sustainable agribusiness sectors. However, there are a number of challenges that need to be overcome, including limited infrastructure, low public awareness, regulatory barriers, and limited funding. This study also found that collaborative strategies between the government, private sector, and communities have proven effective in dealing with these challenges. A real example is the success of the waste bank program which not only increases public environmental awareness but also encourages local economic welfare. This study provides important contributions both theoretically and practically. Theoretically, these findings strengthen the concept that green economy development requires a holistic and integrative approach. Practically, this study offers strategic recommendations, such as strengthening green infrastructure, simplifying regulations, educating the community, and innovation in collaboration-based funding. The implications of this study provide guidance for local governments and other stakeholders in designing and implementing sustainable green economy policies.

Keywords: Green Economy, Sustainable Development, Collaboration, Bandar Lampung, Innovative Strategy.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang, tantangan, dan strategi dalam pengembangan ekonomi hijau di Bandar Lampung, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk mendorong implementasi pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bandar Lampung memiliki berbagai peluang signifikan, seperti potensi sumber daya alam melimpah, keterlibatan aktif komunitas lokal, kebijakan pemerintah yang mendukung, dan minat investasi sektor swasta, terutama dalam sektor energi terbarukan dan agribisnis berkelanjutan. Namun, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, termasuk keterbatasan infrastruktur, rendahnya kesadaran masyarakat, hambatan regulasi, dan keterbatasan pendanaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa strategi kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat terbukti efektif dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut. Contoh nyata adalah keberhasilan program bank sampah yang tidak hanya meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat tetapi juga mendorong kesejahteraan ekonomi lokal. Penelitian ini memberikan kontribusi penting baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, temuan ini memperkuat konsep bahwa pengembangan ekonomi hijau memerlukan pendekatan holistik dan integratif. Secara praktis, penelitian ini menawarkan rekomendasi strategis, seperti penguatan infrastruktur hijau, penyederhanaan regulasi, edukasi masyarakat, dan inovasi pendanaan berbasis kolaborasi. Implikasi dari penelitian ini memberikan panduan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi hijau yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekonomi Hijau, Pembangunan Berkelanjutan, Kolaborasi, Bandar Lampung, Strategi Inovatif.

PENDAHULUAN

Pengembangan ekonomi hijau telah menjadi topik yang semakin penting dalam agenda pembangunan global, khususnya di Indonesia, yang

merupakan salah satu negara dengan sumber daya alam yang melimpah dan beragam. Ekonomi hijau, yang berfokus pada pencapaian keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan

lingkungan, menawarkan solusi terhadap tantangan besar yang dihadapi oleh dunia saat ini, yaitu perubahan iklim, kerusakan ekosistem, dan ketimpangan sosial-ekonomi. Secara lebih khusus, ekonomi hijau bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sambil menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, serta mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Sudirman, 2020: 25). Di Indonesia, potensi ekonomi hijau cukup besar karena keberagaman sumber daya alam yang dimiliki, serta peluang untuk beralih dari sektor ekonomi yang berbasis eksploitasi sumber daya alam menuju sektor-sektor yang lebih berkelanjutan, seperti energi terbarukan, pertanian organik, serta ekowisata.

Namun, meskipun potensi besar tersebut ada, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan transisi ke ekonomi hijau. Salah satu tantangan terbesar adalah ketergantungan yang tinggi pada sektor-sektor yang berbasis sumber daya alam yang tidak terbarukan, seperti batu bara, kelapa sawit, dan deforestasi untuk perluasan lahan pertanian. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan juga memperlambat kemajuan menuju ekonomi hijau. Seiring dengan itu, infrastruktur hijau di Indonesia masih terbatas, dan kebijakan yang mendukung penerapan ekonomi hijau di banyak sektor belum cukup optimal. Hambatan ini membuat upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi hijau dalam kebijakan pembangunan nasional dan sektor swasta masih menghadapi kesulitan. Menurut Pratama (2021: 18), hal ini disebabkan oleh tantangan struktural, seperti ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi berbasis sumber

daya alam dan upaya untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang seringkali berkontradiksi dengan prioritas pembangunan jangka pendek.

Rasionalitas penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menggali lebih dalam mengenai peluang yang dapat dimanfaatkan serta tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan ekonomi hijau di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif berbagai faktor yang mempengaruhi pengembangan ekonomi hijau, termasuk kebijakan pemerintah, peran sektor swasta, dan perubahan dalam perilaku konsumen. Salah satu alasan utama mengapa penelitian ini penting adalah karena meskipun ekonomi hijau menawarkan banyak peluang, seperti diversifikasi ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan baru, serta pengurangan ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas, Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam memanfaatkan peluang-peluang tersebut secara maksimal.

Penelitian ini juga ingin mengidentifikasi dan mengeksplorasi tantangan utama dalam implementasi ekonomi hijau di Indonesia, yang di antaranya berkaitan dengan ketergantungan sektor industri terhadap praktik eksploitasi sumber daya alam, keterbatasan infrastruktur hijau, dan kurangnya keterlibatan sektor swasta dalam investasi hijau yang menguntungkan secara finansial. Selain itu, faktor sosial-ekonomi, seperti rendahnya tingkat pendidikan masyarakat mengenai ekonomi hijau, juga menjadi hambatan yang harus diperhatikan dalam penelitian ini. Beberapa riset sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun terdapat kebijakan yang mendukung ekonomi hijau, seperti program-program untuk mendukung energi terbarukan dan pengelolaan sampah, implementasi di

tingkat daerah dan sektor swasta masih sangat terbatas (Rahmawati, 2019: 12). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mempercepat adopsi ekonomi hijau.

Urgensi penelitian ini menjadi sangat jelas, mengingat dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh praktik ekonomi yang tidak berkelanjutan semakin terasa. Menurut laporan World Bank (2020: 45), Indonesia menghadapi ancaman serius terhadap kerusakan ekosistem, seperti deforestasi, penurunan kualitas udara, dan polusi laut yang semakin meningkat. Ini menuntut adanya pendekatan baru yang lebih berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam pembangunan ekonomi. Sebagai negara dengan keragaman hayati yang sangat kaya, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi hijau yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, ekonomi hijau diharapkan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan ketimpangan sosial dan ekonomi, yang masih sangat nyata di Indonesia, terutama di daerah-daerah perdesaan yang sering kali terpinggirkan dari arus utama pembangunan ekonomi.

Selain itu, pendekatan ekonomi hijau juga berpotensi untuk membuka lapangan pekerjaan baru dan mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor yang merusak lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2022: 33) menunjukkan bahwa sektor energi terbarukan dan ekowisata dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi masyarakat lokal, dengan dampak positif pada perekonomian daerah yang berbasis pada konservasi alam dan pengelolaan sumber daya alam

yang berkelanjutan. Dengan melihat potensi besar ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan untuk lebih serius dalam merumuskan kebijakan yang mendukung ekonomi hijau, serta memberikan solusi untuk mengatasi tantangan yang ada.

Permasalahan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana Indonesia dapat mengoptimalkan potensi ekonomi hijau sambil mengatasi hambatan-hambatan yang ada, baik yang bersifat struktural, sosial, maupun ekonomi. Salah satu cara untuk mengatasi tantangan tersebut adalah dengan melakukan analisis kebijakan pemerintah dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau, serta mengeksplorasi peran sektor swasta dalam investasi hijau yang ramah lingkungan. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat dan pelatihan mengenai pentingnya keberlanjutan lingkungan juga menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan. Sebagai contoh, upaya pemerintah dalam meningkatkan penggunaan energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya dan angin, dapat dilihat sebagai langkah awal yang positif dalam mengurangi ketergantungan pada energi fosil (Rahmawati, 2021: 10). Penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana sektor swasta dapat berperan dalam mendukung ekonomi hijau dengan cara melakukan investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam mendorong ekonomi hijau di Indonesia, serta menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang ekonomi

berkelanjutan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan perspektif baru mengenai potensi ekonomi hijau dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara berkembang lainnya yang menghadapi tantangan serupa.

KAJIAN PUSTAKA

Ekonomi Hijau

Konsep ekonomi hijau didefinisikan oleh UNEP (2011: 16) sebagai ekonomi yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sekaligus secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi. Dalam konteks Indonesia, penerapan ekonomi hijau sangat relevan untuk mengatasi masalah ketergantungan pada eksploitasi sumber daya alam yang tidak terbarukan. Ekonomi hijau juga mencakup transisi menuju praktik-praktik yang lebih berkelanjutan, seperti penggunaan energi terbarukan, efisiensi sumber daya, dan pengurangan limbah. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Sudirman (2020: 25), yang menyatakan bahwa sektor-sektor seperti energi terbarukan, ekowisata, dan pertanian organik memiliki potensi besar untuk mendorong ekonomi hijau di Indonesia.

Keberlanjutan Lingkungan

Keberlanjutan lingkungan merupakan salah satu pilar utama dalam ekonomi hijau. Menurut teori Brundtland (1987: 43), pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Teori ini relevan dalam konteks Indonesia, di mana eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan telah menyebabkan degradasi lingkungan yang signifikan. Rahmawati

(2019: 12) menemukan bahwa salah satu tantangan utama dalam mencapai keberlanjutan lingkungan di Indonesia adalah rendahnya tingkat implementasi kebijakan yang mendukung prinsip-prinsip keberlanjutan, terutama di tingkat daerah.

Pertumbuhan Inklusif

Teori pertumbuhan inklusif menekankan pentingnya memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal. Menurut Hadi (2022: 33), penerapan ekonomi hijau dapat menjadi alat untuk mencapai pertumbuhan inklusif dengan menciptakan lapangan kerja baru di sektor-sektor ramah lingkungan, seperti energi terbarukan dan pengelolaan limbah. Dalam konteks Indonesia, penerapan ekonomi hijau tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di daerah-daerah perdesaan yang seringkali terpinggirkan.

Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan

Kebijakan pembangunan berkelanjutan merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam perencanaan dan implementasi pembangunan. Di Indonesia, kebijakan ini mencakup berbagai inisiatif, seperti Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan pengembangan energi terbarukan. Pratama (2021: 18) mencatat bahwa meskipun kebijakan-kebijakan ini telah diterapkan, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya mencakup kurangnya koordinasi antarinstansi,

keterbatasan pendanaan, dan resistensi dari sektor-sektor yang sudah mapan.

Inovasi Teknologi

Inovasi teknologi berperan penting dalam mendukung pengembangan ekonomi hijau. Menurut teori difusi inovasi yang dikemukakan oleh Rogers (2003: 47), adopsi teknologi baru bergantung pada karakteristik inovasi itu sendiri, seperti kemudahan penggunaan, keuntungan relatif, dan kompatibilitas dengan nilai-nilai yang ada. Dalam konteks ekonomi hijau, teknologi seperti energi surya, biomassa, dan sistem pertanian presisi dapat menjadi pendorong utama dalam mengurangi jejak karbon dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Penelitian oleh Rahman (2020: 21) menunjukkan bahwa adopsi teknologi hijau di Indonesia masih rendah karena keterbatasan akses terhadap pendanaan dan infrastruktur yang memadai.

Kolaborasi Multi-Pihak

Teori kolaborasi menyatakan bahwa kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat adalah kunci untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi kebijakan yang kompleks. Dalam konteks ekonomi hijau, kolaborasi ini diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi hijau dan keberlanjutan. Menurut studi oleh Wicaksono (2022: 19), kolaborasi yang efektif dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mempercepat adopsi teknologi hijau, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi hijau.

Relevansi dengan Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa penerapan ekonomi hijau di Indonesia memiliki potensi besar,

tetapi juga menghadapi berbagai tantangan. Sudirman (2020: 25) menyoroti potensi energi terbarukan sebagai salah satu pilar utama dalam ekonomi hijau, sementara Rahmawati (2019: 12) menekankan pentingnya keberlanjutan lingkungan sebagai landasan dalam pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi temuan-temuan sebelumnya dengan mengeksplorasi lebih dalam strategi-strategi untuk mengatasi tantangan yang ada, serta mengidentifikasi peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung transisi menuju ekonomi hijau.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menggali secara mendalam peluang dan tantangan dalam pengembangan ekonomi hijau di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena sifatnya yang mampu memberikan pemahaman holistik mengenai fenomena kompleks yang melibatkan kebijakan, implementasi, dan interaksi antar pemangku kepentingan. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian, yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap dinamika dan konteks yang relevan (Creswell, 2014). Pendekatan kualitatif memberikan fleksibilitas dalam mengeksplorasi variabel yang mungkin tidak dapat dicakup oleh pendekatan kuantitatif (Denzin & Lincoln, 2011). Dengan demikian, metode ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang kaya dan berbasis data empiris untuk menjawab tujuan penelitian (Patton, 2015).

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan, mulai dari Februari hingga

April 2025. Lokasi penelitian difokuskan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada potensinya dalam pengembangan ekonomi hijau, khususnya di sektor energi terbarukan, pengelolaan limbah perkotaan, dan pertanian organik. Bandar Lampung juga memiliki keberagaman pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, komunitas masyarakat, hingga sektor swasta, yang dapat memberikan wawasan beragam dan mendalam terkait penerapan praktik ekonomi hijau. Dengan fokus di wilayah ini, penelitian diharapkan dapat menggali data yang relevan dan kontekstual untuk mendukung tujuan penelitian.

Target/Subjek Penelitian

Subjek penelitian mencakup tiga kelompok utama: pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah mencakup perwakilan dari kementerian terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta pemerintah daerah. Sektor swasta terdiri dari perusahaan yang bergerak di bidang energi terbarukan, agribisnis berkelanjutan, dan pengelolaan limbah. Sementara itu, masyarakat melibatkan komunitas lokal yang aktif dalam praktik ekonomi hijau, seperti petani organik dan pelaku usaha ekowisata. Pemilihan subjek dilakukan dengan teknik purposive sampling, berdasarkan kriteria keterlibatan langsung dalam inisiatif ekonomi hijau, sehingga data yang diperoleh relevan dan mendalam.

Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan utama. Tahap pertama adalah persiapan, yang mencakup identifikasi lokasi penelitian, pemilihan subjek penelitian, serta penyusunan pedoman wawancara dan instrumen

pengumpulan data lainnya. Tahap kedua adalah pengumpulan data, yang melibatkan wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (focus group discussion/FGD), observasi langsung di lapangan, dan analisis dokumen. Tahap ketiga adalah analisis data menggunakan pendekatan tematik, di mana data diorganisir, dianalisis, dan diinterpretasikan sesuai tema yang relevan. Tahap terakhir adalah validasi data melalui triangulasi sumber dan member checking untuk memastikan keabsahan hasil penelitian (Flick, 2018). Triangulasi dilakukan untuk meningkatkan keandalan data dan menghindari bias yang mungkin terjadi dalam penelitian kualitatif (Patton, 2015).

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder untuk mendukung analisis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan subjek penelitian, FGD, dan observasi lapangan untuk menangkap detail kontekstual. Data sekunder berupa laporan kebijakan, penelitian sebelumnya, artikel jurnal, dan data statistik yang diperoleh dari lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS). Instrumen utama yang digunakan adalah pedoman wawancara semi-terstruktur, yang dirancang untuk menggali informasi mendalam. Selain itu, catatan lapangan dan alat perekam digunakan untuk memastikan kelengkapan dokumentasi. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara untuk memahami pandangan dan pengalaman subjek, observasi untuk mencatat praktik ekonomi hijau di lapangan, dan analisis dokumen untuk mengkaji kebijakan dan data terkait.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan pendekatan tematik, dengan tahapan

yang sistematis. Pertama, data dari wawancara, observasi, dan dokumen diorganisir dan dikodekan berdasarkan tema yang muncul. Kedua, tema-tema utama yang berkaitan dengan peluang dan tantangan ekonomi hijau diidentifikasi dan dikategorikan. Ketiga, setiap tema dianalisis lebih lanjut untuk memahami hubungan antara faktor-faktor pendukung dan penghambat. Keempat, hasil analisis diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan rekomendasi praktis. Pendekatan ini memastikan bahwa analisis data dilakukan secara mendalam dan terfokus pada tujuan penelitian (Braun & Clarke, 2006). Pendekatan tematik memberikan fleksibilitas dalam mengidentifikasi pola-pola yang relevan dengan pertanyaan penelitian dan memudahkan interpretasi data secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Hasil Penelitian

Peluang Pengembangan Ekonomi Hijau di Bandar Lampung

Bandar Lampung memiliki berbagai peluang potensial untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau. Salah satu peluang utama adalah melimpahnya sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk sektor pertanian organik dan energi terbarukan. Praktik pertanian organik telah berkembang pesat di beberapa kecamatan, dengan dukungan kuat dari pemerintah daerah serta organisasi masyarakat lokal. Selain itu, komunitas masyarakat di Bandar Lampung menunjukkan antusiasme tinggi terhadap program-program pengelolaan limbah dan inisiatif ekowisata. Sebagai contoh, beberapa desa telah sukses mengolah limbah menjadi produk kerajinan yang memiliki nilai jual tinggi, sekaligus

membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat.

Kebijakan pemerintah yang mendukung juga menjadi salah satu peluang penting. Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menginisiasi sejumlah program ramah lingkungan, seperti pengembangan bank sampah, pemberdayaan UMKM berbasis ekonomi hijau, dan pemberian insentif kepada pelaku usaha yang menerapkan prinsip keberlanjutan. Selain itu, terdapat minat yang meningkat dari sektor swasta, terutama perusahaan yang bergerak di bidang energi terbarukan. Salah satu contoh konkret adalah rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga surya di wilayah ini, yang menunjukkan adanya peluang investasi jangka panjang.

Tantangan Pengembangan Ekonomi Hijau di Bandar Lampung

Meskipun berbagai peluang mendukung pengembangan ekonomi hijau di Bandar Lampung, penelitian ini juga mengungkap sejumlah tantangan signifikan yang perlu segera diatasi untuk mewujudkan keberlanjutan pembangunan berbasis lingkungan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur. Akses terhadap teknologi hijau, seperti fasilitas untuk pengelolaan limbah modern, jaringan distribusi energi terbarukan, dan transportasi ramah lingkungan, masih belum memadai di banyak wilayah. Infrastruktur yang kurang memadai ini menghambat penerapan praktik ekonomi hijau secara luas, khususnya di sektor-sektor seperti energi terbarukan dan agribisnis berkelanjutan. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, upaya menuju ekonomi hijau hanya akan terbatas pada skala kecil dan sulit untuk direplikasi atau diintegrasikan secara nasional.

Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya praktik ekonomi hijau juga menjadi kendala yang signifikan. Meskipun beberapa komunitas lokal telah aktif dalam program ramah lingkungan, seperti pengelolaan sampah dan ekowisata, kesadaran ini belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Sebagian besar penduduk masih memandang praktik ekonomi hijau sebagai hal yang rumit dan mahal, sehingga partisipasi dalam program-program keberlanjutan belum optimal. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan edukatif dan kampanye kesadaran yang lebih masif dan terfokus.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah hambatan regulasi. Kebijakan terkait ekonomi hijau sering kali tumpang tindih antara tingkat pemerintah pusat dan daerah, serta antar lembaga terkait. Ketidakkonsistenan regulasi ini mengurangi efektivitas implementasi program ekonomi hijau, menciptakan kebingungan di kalangan pelaku usaha, dan memperlambat pengambilan keputusan. Selain itu, proses birokrasi yang kompleks, seperti perizinan untuk proyek energi terbarukan, sering menjadi penghambat utama bagi investor yang ingin terlibat dalam inisiatif hijau. Keterbatasan pendanaan juga menjadi tantangan besar dalam pengembangan ekonomi hijau di Bandar Lampung. Banyak inisiatif lokal yang potensial, seperti pengembangan energi surya atau proyek pengelolaan limbah, terkendala oleh minimnya dukungan finansial. Pelaku usaha kecil dan komunitas lokal sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses pembiayaan, baik dari pemerintah maupun sektor swasta. Selain itu, belum ada skema pendanaan inovatif yang cukup berkembang, seperti kemitraan publik-swasta atau pendanaan berbasis komunitas, yang dapat mendukung inisiatif hijau secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk investasi strategis dalam infrastruktur, edukasi masyarakat, reformasi kebijakan, dan inovasi pendanaan. Dengan mengatasi hambatan ini, Bandar Lampung dapat lebih siap untuk menjadi salah satu daerah percontohan dalam implementasi ekonomi hijau di Indonesia.

Strategi Kolaboratif dalam Mengatasi Tantangan

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat merupakan strategi yang sangat efektif dalam mengatasi berbagai tantangan pengembangan ekonomi hijau di Bandar Lampung. Kolaborasi ini menciptakan sinergi antara berbagai pihak dengan keahlian, sumber daya, dan peran yang saling melengkapi, sehingga memberikan hasil yang lebih maksimal dibandingkan upaya individu.

Salah satu contoh nyata adalah program bank sampah, di mana pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator utama dengan menyediakan regulasi dan kebijakan pendukung. Pemerintah juga berkontribusi dalam sosialisasi program dan penyediaan fasilitas dasar seperti lokasi pengelolaan sampah. Sementara itu, perusahaan swasta mengambil peran sebagai penyedia dana dan teknologi, misalnya dengan memberikan dukungan berupa kendaraan pengangkut sampah, mesin daur ulang, atau program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat berfungsi sebagai pelaksana program, mulai dari pengumpulan sampah, pemilahan, hingga pengelolaan sampah menjadi produk bernilai ekonomi, seperti kerajinan atau kompos.

Kolaborasi semacam ini tidak hanya meningkatkan efektivitas program,

tetapi juga membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan dan praktik ekonomi hijau. Dengan dilibatkan secara langsung, masyarakat merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan dan mendukung program yang berjalan. Selain itu, keberhasilan program ini menciptakan dampak positif yang berlipat ganda, seperti peningkatan pendapatan melalui penjualan produk daur ulang dan pengurangan limbah yang mencemari lingkungan.

Lebih jauh, strategi kolaboratif ini juga memberikan manfaat jangka panjang yang signifikan. Contohnya, program bank sampah berhasil menciptakan ekosistem keberlanjutan, di mana kesadaran masyarakat meningkat seiring berjalannya waktu, dan program ini menjadi mandiri secara finansial melalui skema berbasis komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi bukan hanya solusi jangka pendek untuk mengatasi tantangan, tetapi juga menjadi pondasi untuk keberlanjutan jangka panjang dalam pengembangan ekonomi hijau.

Keberhasilan strategi kolaboratif ini juga menginspirasi penerapan di sektor lain, seperti energi terbarukan dan ekowisata. Dalam proyek pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, misalnya, pemerintah dapat berperan sebagai pemberi insentif dan regulator, sementara perusahaan swasta menyediakan investasi dan teknologi, dan masyarakat dilibatkan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas. Kolaborasi ini memastikan bahwa semua pihak memiliki peran aktif dalam setiap tahap pengembangan, sehingga meningkatkan keberlanjutan dan efisiensi proyek.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa strategi kolaboratif adalah pendekatan yang paling relevan untuk mengatasi tantangan dalam

pengembangan ekonomi hijau. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat perlu terus memperkuat sinergi mereka melalui komunikasi yang efektif, pembagian peran yang jelas, serta komitmen bersama untuk mencapai tujuan keberlanjutan. Dengan pendekatan kolaboratif yang solid, Bandar Lampung memiliki peluang besar untuk menjadi percontohan keberhasilan ekonomi hijau di tingkat nasional.

PEMBAHASAN

Analisis Peluang Ekonomi Hijau

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bandar Lampung memiliki peluang signifikan untuk mengembangkan ekonomi hijau, yang berpotensi menjadi salah satu pilar utama pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut. Sumber daya alam yang melimpah menjadi keunggulan kompetitif yang dapat dimanfaatkan secara strategis, khususnya di sektor pertanian organik dan energi terbarukan. Wilayah ini memiliki potensi besar untuk memproduksi hasil pertanian organik berkualitas tinggi, mengingat kondisi geografis yang mendukung dan keberadaan komunitas petani yang mulai beralih ke metode bercocok tanam ramah lingkungan. Dukungan pemerintah daerah dan lembaga masyarakat turut mempercepat transisi ini dengan memberikan pelatihan, akses pasar, dan pendampingan teknis kepada petani.

Pada sektor energi terbarukan, Bandar Lampung memiliki potensi besar untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya dan biomassa, mengingat sumber daya matahari yang melimpah dan ketersediaan limbah organik dari sektor agrikultur. Proyek-proyek awal seperti pengembangan pembangkit listrik tenaga surya menunjukkan adanya komitmen untuk mengeksplorasi energi bersih yang dapat

memenuhi kebutuhan energi lokal sambil mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Lebih lanjut, keterlibatan komunitas lokal memainkan peran penting dalam mendukung keberhasilan ekonomi hijau. Komunitas masyarakat di beberapa desa telah menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam pengelolaan limbah dan pengembangan ekowisata berbasis lingkungan. Sebagai contoh, inisiatif lokal dalam mengelola limbah menjadi produk kerajinan tangan bernilai ekonomi tinggi tidak hanya menciptakan sumber pendapatan baru, tetapi juga membangun kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat Bandar Lampung telah mulai memahami pentingnya keberlanjutan, meskipun skalanya masih terbatas. Dengan pengelolaan dan dukungan yang lebih baik, potensi ini dapat diperluas ke tingkat yang lebih besar, menciptakan dampak positif bagi ekonomi lokal.

Peluang ekonomi hijau di Bandar Lampung juga sejalan dengan teori pembangunan berkelanjutan, yang menekankan pentingnya memanfaatkan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan (Sachs, 2015). Pendekatan ini memastikan bahwa sumber daya alam tidak hanya dieksploitasi, tetapi juga dilestarikan untuk generasi mendatang. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi hijau tidak hanya bergantung pada eksploitasi sumber daya, tetapi juga pada pembangunan ekosistem yang mendukung keberlanjutan jangka panjang.

Selain itu, kemitraan strategis antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dapat mempercepat pemanfaatan peluang ini. Misalnya, perusahaan swasta dapat berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan, sementara pemerintah memberikan

insentif berupa regulasi yang mendukung dan fasilitas pendukung. Keterlibatan aktif masyarakat dalam implementasi program ini menjadi kunci keberhasilan untuk mencapai transformasi ekonomi hijau yang berkelanjutan.

Dengan semua potensi tersebut, Bandar Lampung memiliki kesempatan besar untuk menjadi model pengembangan ekonomi hijau yang berhasil di Indonesia. Jika dikelola dengan baik, peluang ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap upaya mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal dan nasional. Untuk memaksimalkan peluang ini, diperlukan perencanaan yang matang, sinergi antar pemangku kepentingan, serta edukasi yang menyeluruh kepada masyarakat untuk memastikan keberlanjutan dan dampak jangka panjang.

Evaluasi Tantangan

Tantangan yang teridentifikasi dalam penelitian ini menggarisbawahi pentingnya berbagai upaya strategis untuk mempercepat pengembangan ekonomi hijau di Bandar Lampung. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan infrastruktur, terutama yang terkait dengan akses terhadap teknologi hijau dan jaringan distribusi energi terbarukan. Ketersediaan teknologi ramah lingkungan, seperti instalasi pembangkit listrik tenaga surya atau fasilitas pengelolaan limbah modern, masih sangat terbatas di beberapa wilayah. Infrastruktur yang tidak memadai ini menghambat implementasi program-program ekonomi hijau, sekaligus meningkatkan biaya pengadopsian teknologi tersebut bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Selain itu, pemahaman masyarakat tentang ekonomi hijau masih

memerlukan perhatian lebih. Sebagian besar masyarakat belum sepenuhnya menyadari pentingnya keberlanjutan dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Akibatnya, partisipasi dalam program-program ramah lingkungan masih rendah, terutama di kalangan masyarakat yang kurang mendapatkan akses edukasi terkait isu lingkungan. Rendahnya kesadaran ini dapat menghambat implementasi kebijakan dan program-program yang bertujuan mendorong perubahan perilaku menuju keberlanjutan.

Hambatan regulasi juga menjadi salah satu tantangan signifikan. Regulasi yang ada sering kali tumpang tindih atau kurang terintegrasi, sehingga menciptakan kebingungan di antara pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan inisiatif ekonomi hijau. Sebagai contoh, proses perizinan untuk proyek energi terbarukan sering kali memakan waktu lama karena harus melewati berbagai tahap birokrasi yang tidak efisien. Hal ini tidak hanya mengurangi daya tarik investasi, tetapi juga memperlambat pelaksanaan proyek-proyek yang sudah direncanakan.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan pendanaan. Banyak inisiatif lokal yang memiliki potensi besar untuk mendukung ekonomi hijau terkendala oleh kurangnya dukungan finansial. Keterbatasan ini tidak hanya dialami oleh pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), tetapi juga oleh komunitas lokal yang ingin mengembangkan program berbasis keberlanjutan. Pendanaan dari sektor pemerintah sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan investasi, sementara akses ke sumber pendanaan alternatif, seperti pinjaman komersial atau hibah internasional, juga masih terbatas.

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Wijaya et al.

(2020), yang menekankan bahwa keberhasilan pengembangan ekonomi hijau sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kebijakan yang terintegrasi, dan dukungan finansial yang memadai. Dalam konteks Bandar Lampung, solusi atas tantangan ini memerlukan pendekatan inovatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah kemitraan publik-swasta, di mana sektor swasta berkontribusi dalam bentuk investasi atau penyediaan teknologi, sementara pemerintah menyediakan insentif berupa kebijakan yang mendukung dan infrastruktur dasar.

Selain itu, model skema crowdfunding atau pendanaan kolektif juga dapat menjadi solusi untuk mendukung inisiatif lokal yang berbasis komunitas. Melalui skema ini, masyarakat dapat berkontribusi secara langsung dalam mendanai proyek-proyek kecil yang berdampak besar terhadap lingkungan, seperti pengelolaan limbah terpadu atau pengembangan ekowisata. Skema ini tidak hanya menyediakan sumber pendanaan tambahan, tetapi juga memperkuat keterlibatan masyarakat dalam upaya bersama menuju keberlanjutan.

Dengan mengatasi tantangan ini secara terintegrasi, Bandar Lampung memiliki peluang untuk membangun fondasi ekonomi hijau yang kokoh. Peningkatan infrastruktur, edukasi masyarakat, reformasi regulasi, dan inovasi dalam pendanaan akan menjadi kunci utama untuk mendukung transformasi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan. Langkah-langkah ini tidak hanya relevan untuk konteks lokal, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di tingkat nasional.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bandar Lampung memiliki peluang besar untuk mengembangkan ekonomi hijau melalui pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah, keterlibatan aktif komunitas lokal, kebijakan pemerintah yang mendukung, serta minat investasi dari sektor swasta, khususnya di bidang energi terbarukan dan agribisnis berkelanjutan. Namun demikian, terdapat tantangan signifikan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya kesadaran masyarakat, hambatan regulasi yang tumpang tindih, dan keterbatasan pendanaan. Strategi kolaboratif yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat terbukti menjadi pendekatan yang efektif dalam mengatasi kendala ini, sebagaimana terlihat pada program-program seperti bank sampah yang berhasil meningkatkan keberlanjutan sekaligus kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperluas pemahaman tentang faktor-faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan pengembangan ekonomi hijau, khususnya di wilayah perkotaan dengan karakteristik seperti Bandar Lampung. Secara praktis, temuan ini menawarkan rekomendasi strategis yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah, seperti peningkatan infrastruktur hijau, penyederhanaan regulasi, penguatan edukasi masyarakat, dan inovasi dalam pendanaan berbasis kolaborasi. Implikasi penelitian ini juga relevan secara teoritis, yakni memperkuat argumen bahwa keberhasilan implementasi ekonomi hijau membutuhkan pendekatan yang holistik dan integratif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya

berkontribusi pada literatur akademik tentang ekonomi hijau, tetapi juga memberikan panduan praktis untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). (n.d.). Data Statistik Indonesia. Diakses dari <https://www.bps.go.id>.
- Bappenas. (2022). Rencana Pembangunan Ekonomi Hijau Indonesia 2022-2045. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Brundtland, G. H. (1987). Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development. Oxford: Oxford University Press.
- Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Crowdfunding for Sustainability: Lessons Learned from Community-Based Projects (2022). *Journal of Sustainable Development*, 15(2), 121–130.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The SAGE handbook of qualitative research* (4th ed.). SAGE Publications.
- Fauzi, A., & Anna, Z. (2020). Model Ekonomi Hijau di Indonesia: Konsep dan Implementasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). SAGE Publications.

- Hadi, R. (2022). Potensi Ekonomi Hijau dalam Sektor Energi Terbarukan dan Ekowisata di Indonesia. Jakarta: Pustaka Hijau.
- Hill, H., Resosudarmo, B. P., & Vidyattama, Y. (2022). Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan di Kawasan Asia Tenggara. *Journal of Environmental Economics and Policy*, 13(1), 45-62.
- International Renewable Energy Agency (IRENA). (2021). Renewable Energy Prospects: Indonesia. Abu Dhabi: IRENA.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Mulyadi, M., & Dharmawan, I. (2019). Strategi Kolaboratif Pemerintah dan Sektor Swasta dalam Peningkatan Pengelolaan Limbah Berbasis Komunitas. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 120-134.
- OECD. (2021). *Green Growth Indicators for Cities: A Guide for Developing Green Policies*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research and Evaluation Methods* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Pemerintah Kota Bandar Lampung. (2023). Laporan Tahunan Program Lingkungan dan Keberlanjutan. Bandar Lampung: Dinas Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Limbah Berbasis Lingkungan.
- Pratama, A. (2021). Tantangan Struktural dalam Implementasi Ekonomi Hijau di Negara Berkembang: Studi Kasus Indonesia. Bandung: Green Policy Institute.
- Rahman, F. (2020). Adopsi Teknologi Hijau di Indonesia: Peluang dan Hambatan. *Jurnal Inovasi Teknologi dan Lingkungan*, 15(2), 19-25.
- Rahmawati, N. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Energi Terbarukan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik dan Lingkungan*, 12(1), 10-18.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations* (5th ed.). New York: Free Press.
- Sachs, J. D. (2015). *The Age of Sustainable Development*. New York: Columbia University Press.
- Santosa, H., & Kurniawan, A. (2020). Peran Teknologi dalam Meningkatkan Efisiensi Energi Terbarukan di Indonesia. *Jurnal Energi dan Lingkungan*, 7(3), 89-105.
- Silverman, D. (2020). *Qualitative Research* (5th ed.). London: SAGE Publications.
- Smith, P., & Greenfield, T. (2021). The Role of Public-Private Partnerships in Promoting Renewable Energy in Developing Countries. *Journal of Renewable Energy Development*, 10(2), 234-250.
- Strauss, A., & Corbin, J. (1998). *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Sudirman, B. (2020). Ekonomi Hijau: Peluang dan Tantangan di Era Perubahan Iklim. Surabaya: Mitra Wacana Media.
- Suharto, E., & Widiyanto, A. (2022). Tantangan dan Peluang Ekonomi Hijau di Wilayah Perkotaan. *Jurnal Ekonomi dan*

- Pembangunan Indonesia*, 14(1), 63-77.
- UNEP. (2011). *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*. Nairobi: United Nations Environment Programme.
- UNEP. (2020). *The Green Economy Report: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*. Nairobi: United Nations Environment Programme.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Wijaya, A., Fridell, G., & Meijerink, G. (2020). Green Economy in Practice: Lessons from Sustainable Development Projects in Indonesia. *Environmental Policy and Governance*, 30(3), 165–177.
- Wicaksono, T. (2022). Kolaborasi Multi-Pihak dalam Pengembangan Ekonomi Hijau di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 8(3), 17-24.
- World Bank. (2020). *Indonesia Country Environmental Analysis: Investing in a Sustainable Future*. Washington, DC: World Bank Publications.